



LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
2023

**DINAS KETAHANAN
PANGAN**

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT bahwa atas berkah dan rahmat-Nya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023. Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023 disusun sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah.

Laporan ini merupakan pernyataan tertulis dan sistematis yang memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan tugas pemerintahan serta tugas-tugas lainnya dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini termasuk kepada pihak-pihak yang memberikan masukan dan koreksi penyempurnaan, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023 ini kami susun untuk dapat dipegunakan sebagaimana mestinya.

Serang, Maret 2023

KEPALA,



Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19640614 199803 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Penjelasan umum.....	2
a. Jumlah Pegawai.....	3
b. Realisasi Anggaran.....	5
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	10
a. Permasalahan Staretegis Pemerintah Daerah...	10
b. Visi dan Misi OPD.....	10
c. Program Pembangunan Daerah.....	11
d. Kegiatan Pembangunan Daerah.....	13
Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	17
2.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah.....	17
2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	28
2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	28
2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	28
Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	45
3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi.....	45
3.1.1 Target Kinerja.....	45
3.1.2 Realisasi.....	48
3.2 Permasalahan dan Kendala.....	50
3.3 Saran dan Tindak Lanjut.....	50
Bab IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.	51
Bab V Penutup.....	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2018-2023 berdasarkan Golongan.....	13
Tabel 1.2 Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan (31 Desember 2023).....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu kewajiban pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten setiap tahun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kewenangan yang dimiliki.

Sesuai kewenangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten diberi tugas untuk menangani urusan wajib non pelayanan dasar Ketahanan pangan. Pelaksanaan tugas tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pemberi mandat apakah sudah sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan serta hambatan yang dihadapi untuk perbaikan kinerja di masa datang.

Berdasar kerangka tersebut, Dinas Ketahanan Pangan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Banten, sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bersama-sama instansi terkait lainnya mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan dan kerawanan pangan.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 kepada Gubernur serta sebagai upaya pengendalian agar program dan

kegiatan yang dilakukan dapat terarah, tepat sasaran, berdaya guna serta berhasil guna. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) juga bertujuan untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) baik instansi pemerintah maupun masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

1.1.1 Penjelasan Umum

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Bab II, Pasal 2). Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipologi B menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan di bidang pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Peraturan Daerah No. 8/2016, Paragraf 20, Pasal 116, ayat 1 dan 2), Kemudian diubah dalam Pergub No. 48/2022, Paragraf 1, Pasal 60, Ayat 1 dan 2, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi (Pergub No. 48/2022 Paragraf 3, Pasal 62).

Seiring dengan terbitnya Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dimana telah ditetapkan UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, dengan tugas dan fungsi yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Ketahanan Pangan dibidang pelayanan teknis keamanan pangan, sertifikasi dan pengujian mutu pangan. Dengan

susunan terdiri atas 1 (satu) Kepala UPTD, 1 (satu) Subag Tata Usaha dan 2 (dua) Kasi.

Untuk itu, dalam menyusun dan melaksanakan kegiatannya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten berusaha menyelaraskan Arah Kebijakan Agenda Pembangunan melalui Program dan Indikator Kinerja yang tertuang dalam RPD Provinsi Banten dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

a. Jumlah Pegawai, Jabatan, Pangkat, Golongan dan Pendidikan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten didukung oleh sumber daya aparatur yang tersebar pada Sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksana Tingkat Daerah (UPTD) lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten hingga akhir tahun 2023 berjumlah 55 orang.

Berdasarkan tingkat golongan, jumlah pegawai yang berstatus PNS (55 orang) didominasi oleh pegawai dengan tingkat golongan III, yaitu sebanyak 35 orang (63,63%). Hal ini mencerminkan, bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten didukung oleh kapasitas pegawai yang cukup berpengalaman (memiliki masa kerja yang cukup lama). Golongan IV dengan jumlah pegawai sebanyak 15 orang (27,27%). Sedangkan golongan II berjumlah 5 orang (9,09%). Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, per 31 Desember 2023 aparat berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pendidikan terakhir sarjana (S1, S2, dan S3) cukup dominan yaitu 49 orang dari jumlah total PNS 55 orang atau 89,09%, dan SMU/SMA sebanyak 6 orang atau 9,91%. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia pada Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya relatif memadai.

Tabel 1.1. Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Tahun 2020 - 2023 berdasarkan Golongan

Tahun	Golongan	II				III				IV					Jml
		Ruang	A	b	c	d	a	b	c	d	A	B	c	d	
2020	PNS	-	4	3	4	3	8	14	10	6	5	-	-	-	58
	Total	11				36				11					
2021	PNS	-	4		7	2	5	14	14	10	3	1	-	-	60
	Total	11				35				14					
2022	PNS	-		2	7	2	4	11	16	12	3	1			58
	Total	9				33				16					
2023	PNS	-		2	3	6	4	9	16	12	2	1			55
	Total	5				35				15					

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, 2022

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, per 31 Desember 2023 aparat berstatus Pegawai Negeri Sipil dan non ASN (TKS) yang memiliki pendidikan terakhir sarjana (S1, S2, dan S3) cukup dominan yaitu 48 orang dari jumlah total PNS 58 orang atau 82,75%, D3 sebanyak 4 orang atau 6,89% dan SMU/SMA sebanyak 6 orang atau 10,34%. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya relatif memadai.

Tabel 1.2. Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan
(Per 31 Desember 2023)

NO	STRUKTUR JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
		SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretars/Kepala Bidang/Kpala UPTD	-	-	-	-	1	3	1	5
3.	Kepala Seksi/ Sub Bagian/PLT	-	-	-	-	4	-	-	4
4.	Pelaksana	5	-	-	-	33	7	-	45
5.	Pegawai Non PNS	15	-	-	1	9	-	-	25
JUMLAH		20	-	-	1	47	10	2	80
PERSENTASE (%)		25,0	-	-	1,25	58,75	12,5	2,5	100

b. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dari pagu Rp. **38.995.291.600,00** sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. **36.003.990.731,00** atau **92,33%** dan capaian fisik mencapai **100%**. Tingkat serapan (keuangan) dan capaian fisik tahun 2023 lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 (pada periode yang sama), yang mencapai **98,75%** untuk serapan keuangan dan **100%** untuk capaian fisik.

Berikut disajikan pagu anggaran tahun 2023 dan realisasi keuangan berdasarkan program dan kegiatan.

Tabel 1.3 Rencana dan Realisasi Input (Anggaran) Tahun 2023
(Periode 31 Desember 2023)

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				(Rp.)	(%)	
A	BELANJA OPERASI	38.995.291.600	100	36.003.990.731	92,33	2.991.300.869
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.926.367.200	100	19.002.461.473	95,36	923.905.727
	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	294.096.100	100,	292.096.100	99,32	2.000.000
	a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.000.000	100	65.200.000	98,79	800.000
	b Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.000.000	100	12.000.000	100	-

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				(Rp.)	(%)	(Rp.)
	c Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.000.000	100	12.000.000	100	-
	d Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	100	10.000.000	100	-
	e Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	100	10.000.000	100	-
	f Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	106.883.900	100	105.683.900	98,88	1.200.000
	g Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.212.200	100	77.212.200	100	-
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.071.000.000	100	14.714.031.393	97,63	356.968.607
	a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.635.130.000	100	14.284.801.393	97,61	350.328.607
	b Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	388.370.000	100	381.730.000	98,29	6.640.000
	c Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.000.000	100	14.000.000	100	-
	d Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	100	3.000.000	100	-
	e Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.000.000	100	3.000.000	100	-
	f Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	27.500.000	100	27.500.000	100	-
	3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.500.000	100	17.195.000	34,05	33.305.000
	a Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.500.000	100	17.195.000	34,05	33.305.000
	4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	998.775.140	100	874.663.494	87,57	124.111.646
	a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.550.000	100	10.877.297	94,18	672.703
	b Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.322.000	100	99.025.800	96,78	3.296.200
	c Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	468.285.200	100	446.203.988	95,28	22.081.212
	d Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.812.500	100	58.828.000	95,17	2.984.500
	e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.909.300	100	12.829.500	99,38	79.800
	f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	336.271.840	100	241.495.009	71,82	94.776.831
	g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.624.300	100	5.403.900	96,08	220.420
	5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.583.001.560	100	1.335.502.114	84,57	247.499.446
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	100	3.289.000	99,67	11.000

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				(Rp.)	(%)	
	b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.000	100	195.000	100	-
	c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.579.506.560	100	1.332.018.114	84,33	247.488.446
	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	534.484.000	100	409.475.000	76,61	125.009.000
	a Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	147.446.000	100	141.250.000	95,80	6.196.000
	b Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	328.516.000	100	216.675.000	65,96	111.841.000
	c Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.522.000	100	51.550.000	88,09	6.972.000
	7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.236.576.200	100	1.223.105.262	98,91	13.470.938
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	687.701.429	100	677.750.500	98,55	9.950.929
	b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.800.000	100	146.753.000	98,62	2.047.000
	c Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.074.771	100	398.601.762	99,63	1.473.009
	8 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	72.414.200	100	68.968.910	95,24	3.445.290
	a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.697.000	100	4.697.000	100,00	-
	b Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.982.700	100	19.204.200	96,10	778.500
	c Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.984.500	100	13.265.800	94,86	718.700
	d Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.500.000	100	16.490.800	99,94	9.200
	e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.300.000	100	3.008.500	91,17	291.500
	f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.950.000	100	12.302.610	88,19	1.647.390
	9 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	3.300.000	100	2.895.000	87,73	405.000-
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	100	2.895.000	87,73	405.000
	10 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	36.020.000	100	22.532.000	62,55	13.488.000
	a Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.207.000	100	6.875.600	39,96	10.331.400
	b Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.813.000	100	15.656.400	83,22	3.156.600

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp.)
				(Rp.)	(%)	
	11 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	46.200.000	100	41.997.200,00	90,90	4.202.800
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.990.000	100	36.507.200	98,69	482.800
	b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.210.000	100	5.490.000	59,61	3.720.000
II	PROGRAM PENGELOLA SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEADILAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	449.063.540	100	415.591.000	92,55	33.472.540
	12 Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	449.063.540	100	415.591.000	92,55	33.472.540
	a Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	149.063.540	100	115.591.000	77,54	33.472.540
	b Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	300.000.000	100	300.000.000	100	-
III	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	16.350.721.260	100	14.656.279.676	89,64	1.694.441.584
	13 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.923.729.100	100	1.310.074.850	68,10	613.654.250
	a Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	502.700.800	100	393.485.950	78,27	109.214.850
	b Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	706.057.300	100	422.711.200	59,87	283.346.100
	c Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	342.102.000	100	269.571.600	78,80	72.530.400
	d Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	372.869.000	100	224.306.100	60,16	148.562.900
	14 Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	12.690.279.300	100	11.814.311.026	93,10	875.968.274
	a Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	2.567.433.500	100	1.784.489.888	69,50	782.943.612
	b Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	120.000.000	100	71.808.000	59,84	48.192.000
	c Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	10.002.845.800	100	9.958.013.138	99,55	44.832.662

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				(Rp.)	(%)	(Rp.)
15	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	1.736.712.860	100	1.531.893.800	88,21	204.819.060
a	Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	856.238.600	100	818.310.500	95,57	37.928.100
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	811.238.030	100	665.105.900	81,99	146.132.130
c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	69.236.230	100	48.477.400	70,02	20.758.830
III	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.679.408.000	100	1.391.038.920	82,83	288.369.080
16	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	200.000.000	100	85.133.060	42,57	114.866.940
a	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	200.000.000	100	85.133.060	42,57	114.866.940
17	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	1.479.408.000	100	1.305.905.860	88,27	173.502.140
a	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	300.000.000	100	266.567.700	88,86	33.432.300
b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.179.408.000	100	1.039.338.160	88,12	140.069.840
IV	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	589.731.600	100	538.619.662	91,33	51.111.938
18	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	278.010.400	100	256.928.062	92,42	21.082.338
a	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	278.010.400	100	256.928.062	92,42	21.082.338
19	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	311.721.200	100	281.691.600	90,37	30.029.600
a	Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	220.282.400	100	212.865.900	96,63	7.416.500
b	Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	91.438.800	100	68.825.700	75,27	22.613.100
T O T A L		38.995.291.600	100	36.003.990.731	92,33	2.991.300.869

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Eksistensi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis terkait dengan ketahanan pangan, baik di tingkat nasional maupun regional. Fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sangatlah strategis dengan permasalahan dan isu-isu penting yang berkembang, antara lain :

- Belum Optimalnya Cadangan Pangan Strategis ;
- Belum Optimalnya Diversifikasi Pangan;
- Belum Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan;
- Belum Optimalnya Ketersediaan dan Sumberdaya Pangan dalam Mendukung Ketersediaan Pangan di Provinsi Banten;
- Belum Memadainya Infrastruktur dan Penunjangnya bagi Kemandirian Pangan dalam berbagai Sektor;
- Belum Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan

b. Visi dan Misi

Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, adalah **“Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD V-3 Provinsi Banten Tahun 2005–2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah yaitu : (1) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas; (2) Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan; (3) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; (4) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi tersebut adalah:

1. *Misi ke-2*, Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan Tujuan misi ke-2 adalah Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sasaran adalah Meningkatnya ketahanan pangan.
2. *Misi ke-4* yaitu *Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa*, dengan tujuan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan. Dengan sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi dan Misi selanjutnya dipertegas melalui strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi yang dilaksanakan perlu didukung oleh kebijakan yang bersifat umum dan dikaitkan dengan prioritas pembangunan beserta program yang akan dilaksanakan

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk melaksanakan misi dan prioritas daerah serta menggambarkan keterkaitan antar bidang pada urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Banten, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dengan rumusan indikator kinerja sasaran daerah beserta target pelaksanaan indikasi kegiatan tahunan selama 5 tahun

Setelah kebijakan umum dan program pembangunan dibuat, langkah selanjutnya adalah meletakkan program pembangunan daerah sesuai bidang pada tiap urusan pemerintahan. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan

daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk kegiatan prioritas pembangunan.

Tabel 1.3
Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

VISI: BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA			
Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi
			Menurunnya daerah rawan pangan
			Meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi pangan
			Meningkatnya pengawasan keamanan PSAT
MISI 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan

Sebagaimana dalam dokumen RPD 2023-2026, menetapkan 2 (dua) kebijakan umum yang dijabarkan pada 5 (lima) program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, yaitu :

1. **Meningkatnya Daya Beli Masyarakat** , melalui Strategi Meningkatkan Cadangan Pangan dan Perlindungan daerah dan arah kebijakan Peningkatan Ketersediaan Pangan yang didukung oleh Infrastruktur penunjangnya untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah dan Keamanan Pangan yang Tersertifikasi serta Penyediaan lumbung pangan melalui BUMD yang bergerak di sector pangan. dijabarkan melalui 4 (empat) program, yaitu:
 - a) Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedualatan dan Kemandirian Pangan;
 - b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;

- c) Program Penanganan Kerawanan Pangan; dan
- d) Program Pengawasan Keamanan Pangan.

2. Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

dengan strategi dan arah kebijakan yaitu Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan, arah kebijakannya yaitu Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah.

Di ampuh melalui 1 (satu) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan indikator kinerja program Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan, serta mekanisme pembiayaan pembangunan ketahanan pangan yang memerlukan regulasi Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Kabupaten/Kota.

Sebagaimana dalam dokumen Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023, menetapkan 2 (dua) kebijakan umum yang dijabarkan pada 5 (lima) program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, yaitu :

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
- 2 Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedualatan dan Kemandirian Pangan

3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan; dan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Dari 5 (lima) program yang telah ditetapkan, terdapat 18 (delapan belas) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan.

Tabel 1.4

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
				4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				5. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				6. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
				6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				6. Penyediaan Bahan Material

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel
				2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		8.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		9.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		10.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD)	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		11.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD)	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi	12.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	1. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
				2. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	13.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
				2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
				3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
				4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
		14.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
				2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan				
15.	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	1. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)		
		3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		
Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	16.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
		17.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 2. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	18.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
		19.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)	1. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Ketahanan Provinsi Banten pada Tahun 2023 telah melaksanakan 1 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dimana urusan tersebut telah dilaksanakan melalui 5 Program, 19 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan.

Ada beberapa faktor penghambat dalam Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah badai el nino yang menghantam Indonesia sepanjang tahun 2023 mengakibatkan musim kemarau yang berkepanjangan tidathun 2023, sehingga produksi pertanian menurun.

Pemutusan kontrak kerja besar-besaran dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri, yang berdampak pada pelemahan pada sektor ekonomi yang mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat.

Tabel 2.1
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Upaya Tindak Lanjut
1	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Perda Provinsi Banten No Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun 2023	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : Persen)	100%	100%	100%		
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100 %		
				a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan : dokumen)	2,00	2,00	100 %		
				b. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan : dokumen)	2,00	2,00	100 %		
				c. Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan : dokumen)	2,00	2,00	100 %		
				d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan : dokumen)	2,00	2,00	100 %		
				e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan : dokumen)	2,00	2,00	100 %		
				f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Satuan : Laporan)	12,00	12,00	100 %		

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Upaya Tindak Lanjut
				g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan : Laporan)	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %		
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100 %		
				a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan : Orang/Bulan)	60,00	60,00	100 %		
				b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan : dokumen)	12,00	12,00	100 %		
				c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan : dokumen)	12,00	12,00	100 %		
				d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan : Laporan)	1,00	1,00	100 %		
				e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan : dokumen)	1,00	1,00	100 %		
				f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan : Laporan)	18,00	1,0018,00	100 %		
				3. Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100 %		
				a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan Orang)	1,00	1,00	100 %		
				4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100 %		

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Upaya Tindak Lanjut
				a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)</i>	1,00	1,00	100 %		
				b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)</i>	1,00	1,00	100 %		
				c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)</i>	1,00	1,00	100 %		
				d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)</i>	1,00	1,00	100 %		
				e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan : Dokumen)</i>	1,00	1,00	100 %		
				f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)</i>	1,00	1,00	100 %		
				g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan : Dokumen)</i>	1,00	1,00	100 %		
				5. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100 %		
				a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)</i>	1,00	1,00	100 %		
				b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)</i>	1,00	1,00	100 %		
				c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Paket)</i>	12,00	12,00	100 %		
				d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan : Paket)</i>	1,00	1,00	100 %		
				e. Penyediaan Bahan Bacaan dan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan</i>	1,00	1,00	100 %		

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Upaya Tindak Lanjut
				Peraturan Perundang-undangan	<i>dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan : Dokumen)</i>					
				f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)</i>	10,00	10,00	100 %		
				6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100 %		
				a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan : Laporan)</i>	1,00	1,00	100 %		
				b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan : Laporan)</i>	12,00	12,00	100 %		
				c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)</i>	12,00	12,00	100 %		
				7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100 %		
				a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan : Laporan)</i>	1,00	1,00	100 %		
				8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100 %		
				a. Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan : Paket)</i>	15,00	15,00	100 %		
				b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)</i>	58,00	58,00	100 %		
				c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)</i>	15,00	15,00	100 %		

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Upaya Tindak Lanjut
				9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100 %		
				a. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	3,00	3,00	100 %		
				b. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan : Unit)	6,00	6,00	100 %		
				10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100 %		
				a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : Unit)	18,00	18,00	100 %		
				b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : Unit)	173,00	173,00	100 %		
				c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan : Unit)	1,00	1,00	100 %		
				11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100 %		
				a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan : Unit)	2,00	2,00	100 %		
				b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan : Unit)	10,00	10,00	100 %		
				Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (Satuan :Persen)	100	100	100 %	1. Kurang optimalnya sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat, bencana alam	1. Mengembangkan sistem cadangan pangan daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Upaya Tindak Lanjut
									dan bencana sosial. 2. Lemahnya Kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan cadangan komoditas lainnya selain beras	untuk mengantisipasi kondisi darurat, bencana alam dan bencana sosial. 2. Pengembangan Sistem cadangan pangan melalui lembaga usaha ekonomi produktif atau lembaga usaha lainnya. 3. Pengembangan Sistem caadangan pangan melalui lembaga usaha ekonomi produktif atau lembaga usaha lainnya
				12. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	<i>Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi (Satuan : Persen)</i>	100	100	100 %	Dalam penyusunan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan, hanya menggambarkan proyeksi kebutuhan Infrastruktur pangan, belum menghasilkan rekomendasi rencana aksi kebutuhan pangan	Telah dilakukan kajian lebih mendalam dalam penyusunan peta jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan
				a. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Satuan : Laporan)</i>	1,00	1,00	100 %		
				b. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	<i>Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan (Satuan : Dokumen)</i>	1,00	1,00	100 %		

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Upaya Tindak Lanjut
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Satuan : Persen)	85	93,3	109,76 %	1. Masih rendahnya produksi pangan di wilayah rawan pangan dibandingkan dengan kebutuhan. 2. Tingginya prevalensi balita stunting. 3. Terbatasnya akses air bersih. 4. Masih tingginya persentase penduduk miskin di daerah rentan rawan pangan tersebut .	1. Pemberian bantuan pangan beras portivikasi di daerah rawan pangan. 2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder. 3. Penataan prasarana pertanian, perikanan dan peternakan. 4. Pembinaan masyarakat di daerah rentan pangan.
				13. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100 %	1. Banyaknya permohonan lokasi pelaksanaan GPM dari masyarakat/lembaga 2. Kurangnya komitmen Gapoktan terhadap MoU pasokan ke TTID	1. Penambahan lokasi pelaksanaan GPM Teralokasi pada kegiatan dekonsentrasi 2. Melakukan sosialisasi dan bintek dalam pembinaan Gapoktan
				a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	<i>Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Satuan : Laporan)</i>	12,00	12,00	100 %		
				b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Satuan : Laporan)</i>	12,00	12,00	100 %		
				c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	<i>Informasi Prognosa Harga (Satuan Dokumen)</i>	12,00	12,00	100 %		
				d. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	<i>Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan (Satuan : Unit)</i>	44,00	44,00	100 %		

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Upaya Tindak Lanjut
				14. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100 %	Adanya perubahan harga beras yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bapanas No. 333.1/HK.02.05/K/VII/2023 tentang Harga Pembelian Beras untuk CPP Tahun 2023	Addendum jual beli beras dengan Bulog dan penyesuaian stok beras dengan harga beras yang telah ditetapkan pemerintah
				a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi (Satuan : Laporan)</i>	12,00	12,00	100 %		
				b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	<i>Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Satuan : Dokumen)</i>	1,00	1,00	100 %		
				c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Satuan : Laporan)</i>	1,00	1,00	100 %		
				15. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi (Satuan : Persen)	100,00	100,00	100 %	Tidak validnya data penerima bantuan untuk penanganan penurunan stunting di Masyarakat	Melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan di lokasi stunting
				a. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	<i>Jumlah Pembinaan Sumberdaya Manusia dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Satuan : Dokumen)</i>	20,00	20,00	100 %		
				b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Satuan : Laporan)</i>	12,00	12,00	100 %		
				c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		9,00	9,00	100 %		
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (Satuan : Persen)	22,22	22,22	100 %	1. Masih rendahnya produksi pangan di wilayah rawan pangan	1. Pemberian bantuan pangan beras portivikasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Upaya Tindak Lanjut
									dibandingkan dengan kebutuhan. 2. Tingginya prevalensi balita stunting. 3. Terbatasnya akses air bersih. 4. Masih tingginya persentase penduduk miskin di daerah rentan pangan tersebut .	di daerah rawan pangan. 2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder. 3. Penataan prasarana pertanian, perikanan dan peternakan. 4. Pembinaan masyarakat di daerah rentan pangan.
				16. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi (Satuan : Dokumen)	1,00	1,00	100 %	Adanya peraturan terbaru dalam penyusunan dan pemutakhiran Peta FSVA	Melakukan sosialisasi dan bintek penyusunan dan pemutakhiran Peta FSVA
				a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Satuan : Dokumen)	1,00	1,00	100 %		
				17. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi (Satuan : Dokumen)	6,00	6,00	100 %	Dalam pengadaan bantuan pangan beras tidak ada beras fortivitas keberadaan dipasaran tidak tersedia atau melalui proses	Mengganti bantuan beras dari beras fortivitas menjadi beras premium dalam pengadaannya
				a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi (Satuan : Dokumen)	5,00	5,00	100 %		
				b. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Satuan : Dokumen)	1,00	1,00	100 %		
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi	25	38,75	155 %	1. Perubahan Sistem dalam pendaftaran dari	1. Pengawasan di tingkat pelaku

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Upaya Tindak Lanjut
					persyaratan mutu dan keamanan pangan (Satuan : Persen)				manual ke online, dimana para pelaku usaha kecil tidak mempunyai teknologinya sehingga sulit untuk mengaksesnya. 2. Banyak pelaku usaha kecil tidak memiliki INB dan NPWP dimana itu merupakan persyaratan dalam mendaftarkan produk mereka secara online di OSS 3. Kurangnya tenaga fungsional uji mutu hasil pangan segar asal tumbuha (PSAT) yang ada, sampai dengan tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten baru memiliki 1 (satu) orang tenaga fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian 4. Sampai saat ini Provinsi Banten belum memiliki Laboratorium pengujian pangan segar asal tumbuhan (PSAT) sendiri.	usaha PSAT, melalui uji sampel dan uji lab PSAT. 2. Meningkatkan surveillance atas pelaku usaha/petani yang sudah memiliki sertifikat prima 2-3 maupun produk PSAT yang sudah teregistrasi secara ketat dan kontinyu 3. Penguatan kelembagaan dan SDM pengawas mutu pangan. 4. Perbanyak sosialisasi cara pendaftaran PSAT secara online di OSS baik secara cetak dan elektronik.
			18 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Satuan : Dokumen)	100,00	100,00	100 %			
			a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina (Satuan : Dokumen)	1,00	1,00	100 %			
			19 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Satuan : Dokumen)	100,00	100,00	100 %			
			b. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Satuan : Sertifikat)	25,00	27,00	108 %			
			c. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Satuan : Dokumen)	30,00	128,00	426,67 %			

2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan, penyimpanan di Bulog
		2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	45.540 KK (455,4 Ton)	Dinas Ketahanan Pangan
		3. Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	214,99 Ton	Dinas Ketahanan Pangan
		4. Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Ada	Dinas Ketahanan Pangan
		5. Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	3 kali promosi	Dinas Ketahanan Pangan
		6. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	Ada	FSA 2023
		7. Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Tidak ada	SKPG 2020
		8. Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	6 Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan
		9. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	8.679 KK	Dinas Ketahanan Pangan
		10. Teregistrasi dan tersertifikasi PSAT	155 Sertifikasi	Dinas Ketahanan Pangan

2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pangan	Jumlah cadangan pangan X 100% Jumlah kebutuhan pangan provinsi 214,994 Ton _____ x 100% 1.344 Ton	15,99%	Dinas Ketahanan Pangan, Permentan Nomor 11 Tahun 2018

2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berikut adalah perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah		Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Satuan: Skor)	70,73
		Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (Satuan :Persen)	100
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Satuan : Persen)	85
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (Satuan : Persen)	22,22
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (Satuan : Persen)	25
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan		Capaian SAKIP (sSatuan : Nilai)	74
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Satuan : Persen)	100

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Mengingat pernyataan suatu hasil menyatakan apa yang ingin dicapai, indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuannya telah tercapai. Indikator biasanya merupakan ukuran kuantitatif, tetapi bisa juga berupa pengamatan kualitatif. Indikator tersebut menentukan bagaimana kinerja akan diukur menurut suatu skala atau dimensi, tanpa menjelaskan secara spesifik suatu tingkat pencapaian tertentu.

Berikut disajikan uraian atas Capaian kinerja terhadap target Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023.

Tabel 2.5
Capaian Target Kinerja Tahun 2023

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (satuan: %)	100	100	100
2	Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (satuan: %)	100	78,34	78,43
3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (satuan: %)	85	93,3	109,76
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Ketersediaan Pangan (satuan: %)	22,22	22,22	100
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi (satuan : %)	25	38,75	155

1) Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan

Capaian indikator tahun 2023 mencapai angka 100%. Angka ini merupakan pencapaian 100% dari target kinerja sebesar 100%. Unsur-unsur yang dinilai dalam indeks kepuasan masyarakat ini meliputi Respon pengaduan, sarana dan prasarana, sikap petugas, professional ASN, kualitas hasil pelayanan, respon kecepatan pelayanan, prosedur, dan pelayanan teknis.

Hambatan dalam capaian kinerja ini adalah kinerja masih berbasis output, koordinasi lintas sektor masih belum maksimal, keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian masih belum optimal, keterpaduan dan sinergitas antara pusat dan daerah masih kurang, penggunaan sumberdaya yang ada belum efektif dan efisien, implementasi Rerormasi Birokrasi belum dilakukan secara merata dan terintegrasi pada seluruh unit kerja, belum ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Grand Design teknologi informasi (Road Map E-Government).

2) Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian Pangan

Indikator Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian Pangan adalah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan target 100%. Jumlah Stok Beras per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 1.053,79 Ton, Jumlah kebutuhan pangan provinsi setelah dihitung berdasarkan Permentan No. 11 Tahun 2018 sebanyak 1.344 Ton. Sehingga Persentase CPP Provinsi Banten Tahun 2023

adalah $1.053,79/1.344 \times 100\% = 78,34\%$, dengan demikian capaian kinerja program ini adalah **78,34 %**.

Namun apabila melihat Perbadan No 15 Tahun 2023, dimana penghitungan CPP Provinsi Banten yaitu sebanyak 370,31 Ton. Sehingga Persentase CPP Provinsi Banten Tahun 2023 adalah $1.053,79/370,31 \times 100\% = 284,57\%$.

Tidak tercapainya target ini dikarenakan antara lain : (1) Kurang optimalnya sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat, bencana alam dan bencana sosial; (2) Lemahnya Kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan cadangan komoditas lainnya selain beras.

Realisasi capaian kinerja program ini dilaksanakan oleh kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi dengan output Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan target 100% dan Capaian indikator 100%.

3) Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Skor Pola Pangan Harapan dengan target 85%. Skor PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan, untuk memenuhi energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah mutu yang mem vpertimbangkan aspek ketersediaan pangan.

Dari 9 kelompok pangan pendukung Skor PPH konsumsi diantaranya, Kelompok Padipadian, Kelompok Umbi-umbian, Kelompok Pangan Hewani, Kelompok Minyak dan

Lemak, Kelompok Buah/Biji Berminyak, Kelompok Kacang-kacangan, Kelompok Gula, kelompok Sayur dan Buah dan kelompok Lain-lainya, Berdasarkan kontribusi energinya pola konsumsi pangan penduduk di Provinsi Banten didominasi oleh padi-padian (beras) dan minyak & lemak (minyak sawit).

Hasil harmonisasi data Susenas menunjukkan bahwa Tingkat Kecukupan Energi & Protein konsumsi pangan penduduk Provinsi Banten sudah lebih dari Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan secara nasional, yaitu sebesar 2.207 kkal/kap/hari untuk energi dan 66,9gr/kap/hari untuk protein.

Skor PPH konsumsi pangan penduduk Provinsi Banten sudah mencapai 93,3 dengan standar AKE 2100 kkal/kapita/hari dengan rincian sebagai berikut : Kelompok Padi-padian (25,0), Kelompok Umbi-umbian (1,2), Kelompok Pangan Hewani 24,0, Kelompok Minyak dan Lemak (5,0), Kelompok Buah/Biji Berminyak (0,2), Kelompok Kacang-kacangan (7,5), Kelompok Gula (1,1), kelompok Sayur dan Buah (29,2) dan kelompok Lain-lainya (0,0).

Target kinerja Skor PPH konsumsi Tahun 2023 adalah **83%**, dan realisasi **93,3%** dengan demikian capaian kinerja adalah **109,76%**.

Faktor pendorong pencapaian target ini adalah (1) Adanya peningkatan kualitas keluarga melalui penyelenggaraan keluarga berencana(KB) yang mengatur jarak jumlah anggota keluarga, karna bersaran keluarga sangat mempengaruhi pengeluaran perkapita; (2) ketersediaan pangan local yang melimpah; (3) Adanya teknologi yang selalu berkembang; (4) Trend perubahan erilaku masyarakat konsumen terhadap produk olahan pangan; (5) Pangsa pasar yang semakin terbuka, terutama produk domestic.

Hambatan dalam capaian indikator ini dikarenakan antara lain : (1) Masih rendahnya tingkat keberagaman (diversifikasi) konsumsi pangan masyarakat; (2) belum optimalnya pemanfaatan sumber pangan lokal; dan (3) belum optimalnya promosi akan pentingnya konsumen pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

3) Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Penanganan Kerawanan Pangan

Indikator Program Penanganan Rawan Pangan adalah Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan, Jumlah penanganan daerah rawan pangan sebanyak 18 Kecamatan berdasarkan Peta FSVA Tahun 2021. Target penanganan daerah rawan pangan pada Tahun 2023 adalah sebanyak 4 Kecamatan (22,22%).

Penanganan kerawanan pangan di daerah rentan rawan pangan sesuai dengan peta FSVA tahun 2021 sebanyak 18 kecamatan, namun target pada 2023 penanganan sebanyak 4 kecamatan yaitu di Kecamatan Cisauk Kab. Tangerang, Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, Kec. Kosambi Kab. Tangerang dan Kec. Curug Kab. Tangerang. Dengan demikian capaian kinerja untuk program ini adalah sebesar 100%.

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja indikator program ini adalah : (1) Terbentuknya kelompok Masyarakat pada daerah rawan pangan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan Masyarakat miskin; (2) Komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam pengentasan kemiskinan. Adapun hambatannya adalah : (1) Masih rendahnya produksi pangan di wilayah rawan pangan dibandingkan dengan kebutuhan; (2) Tingginya prevalensi balita stunting; (3) Terbatasnya akses air bersih dilokasi daerah rawan pangan; (4) Masih tingginya persentase penduduk miskin di daerah rentan rawan pangan tersebut.

4) **Capaian Kinerja Outcome atas Indikator Program Pengawasan Keamanan Pangan**

Capaian indikator prosentase Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) adalah Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.

Target pada Renstra Dinas ketahanan Pangan Tahun 2023-2026, jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sebanyak 400 Sertifikat/Registrasi, dimana untuk Tahun 2023 targetnya sebanyak 100 Sertifikat/Registrasi (25%).

Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan diperedaran yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan yang didaftarkan pada Tahun 2023 yaitu sebanyak 155 Sertifikat/Registrasi atau 155 % dari Target Tahun 2023 sebanyak 100 Sertifikat/Registrasi. Untuk Capaian Program sebesar **38,75%** dari target **25%**.

Pencapaian target indicator program ini di sebabkan berbagai faktor, diantaranya (1) Kesadaran yang tinggi para pelaku usaha akan pentingnya keamanan mutu produknya; (2) pendaftaran yang berbasis online mempermudah para pelaku usaha dalam mendaftarkan produk mereka; (3) Persaingan para pelaku usaha dalam memasarkan produknya, Dimana salah satu manfaatnya registrasi/sertifikasi produk PSAT adalah memberikan “branding” terhadap produknya.

Adapun hambatannya adalah : (1) Perubahan Sistem dalam pendaftaran dari manual ke online, dimana para pelaku usaha kecil tidak mempunyai teknologinya sehingga sulit untuk mengaksesnya; (2) Banyak pelaku usaha kecil tidak memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan NPWP dimana itu

merupakan persyaratan dalam mendaftarkan produk mereka secara online di OSS; (3) Kurangnya tenaga fungsional uji mutu hasil pangan segar asal tumbuha (PSAT) yang ada, sampai dengan tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten baru memiliki 1 (satu) orang tenaga fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja pada tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2022, mengingat pada tahun 2023 dikarenakan perbedaan indikator poram, Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022-2026. Namun untuk indikator utama masih sama yaitu indeks ketahanan pangan, yang mengalami kenaikan dalam pencapaian targetnya pada tahun 2023 dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2022. Hal ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.5
Capaian Target Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA (Outcome)	REALISASI 2022	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023 %	DEVIASI CAPAIAN %
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (Satuan Skor)	86,80	78,71	111,28	-24,48

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Pengukuran capaian kinerja terhadap target yang tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah atau RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, dimana tahun 2023 dari 5 (lima) target indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang ditetapkan tingkat Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD mencapai 100%, sedangkan rata-rata capaian indikator 4(empat) target kinerja mencapai 82,44 %, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 2.6
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Renstra

Program	Indikator Program RPJMD (Outcome)	Target Kinerja Dalam RPJMD 2023	Realisasi Capaian Target RPJMD Provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD 2023	Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi 2023
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (satuan: %)	100	100	100
Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (satuan: %)	100	78,34	100
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (satuan: %)	85	93,3	85
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (satuan: %)	22,22	22,22	22,22
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (satuan : %)	25	38,75	25

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dikaitkan dengan hasil(kinerja) yang telah dicapai

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, bahwa semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Kriteria efisiensi mengacu Kepmendagri tersebut bahwa rasio efisiensi: a) jika > 100,00 persen berarti “tidak efisien”; b) 90,00 - 100,00 persen berarti “kurang efisien”; c) 80,00– 90,00 persen berarti “cukup efisien”; d) 60,00 – 80,00 persen berarti “efisien”; e) dan jika < 60,00 persen berarti “sangat efisien”.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan cara membandingkan persentase capaian kinerja terhadap persentase capaian atau penyerapan anggaran.

Tabel 2.7
Analisi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien	Capaian Sakip	109,46	89,15	20,31
2	Meningkatnya Ketahanan Daerah yang Terjaga	Indek Ketahanan Pangan Daerah	111,28	95,36	15,92

Dapat dilihat dari table diatas Tingkat efisien rata2 18,11%, bahwa persentase anggaran lebih kecil dari capaian kinerja yang berarti sangat efisien.

f. Analisa Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja per Sasaran Strategis tersebut, disajikan Capaian Kinerja sasaran strategis beserta penjelasan analisa capaian per indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian Pangan

Capaian kinerja program ini adalah **78,34 %**, Realisasi capaian kinerja program ini dilaksanakan oleh kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi dengan output Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan target 100% dan Capaian indikator 100%. Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan diantaranya :

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur, outputnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik sebanyak 1 laporan, realisasi 1 Laporan dengan capaian Kinerja 100%.
- b) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur, dengan output Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan, Outputnya Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan sebanyak 1 Dokumen, realisasi 1 Dokumen dan capaian kinerja 100%.

2. Program Peningkatan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Target kinerja program ini adalah Skor PPH 2023 adalah **85%**, dan realisasi **93,3%** dengan demikian capaian kinerja adalah **109,76%**.

Penjelasan capaian indikator kinerja :

Indikator Kinerja Capaian Keterjangkauan/Akses Pangan bertujuan untuk tercapainya keterjangkauan pangan masyarakat.

Realisasi dan capaian indicator kinerja program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerja sebaga berikut :

A. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Output kegiatannya Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan capaian 100%. Sub kegiatannya antara lain :

a) Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan, dengan output yaitu Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan, target 12 Laporan, realisasi 12 Laporan dan capaian kinerja 100%.

b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya dengan output Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya, target 12 laporan, realisasi 12 Laporan dan capaian kinerja 100%.

- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan dengan output Informasi Prognosa Harga, target 12 Dokumen, realisasi 12 Dokumen dan capaian kinerja 100%.
 - d) Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan dengan output Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan, target 44 Unit, realisasi 44 Unit dan Capaian kinerja 100%.
- B. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, Output kegiatannya adalah Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi dengan capain kinerja 100%, dengan Sub Kegiatan antara lain :
- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi dengan output Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi, target 12 Laporan, realisasi 12 Laporan dan capaian kinerja 100%.
 - b) Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal dengan output Rencana Kebutuhan Pangan Lokal, target 1 Dokumen, realisasi 1 Dokumen dan capaian kinerja 100%.
 - c) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dengan output Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerinta, target 1 dokumen, realisasi 1 Dokumen dan capaian kinerja 100%.
- C. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi, Output kegiatannya Persentase Ketercapaian Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi, dengan

capaian kinerja 100%. Adapun Sub Keegiatannya antara lain :

- a) Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan output Jumlah Pembinaan Sumberdaya Manuasia dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, target 20 Dokumen, realisasi 20 Dokumen dan capaian kinerja 100%.
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan output Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), target 12 Dokumen, realisasi 12 Dokumen dan capaian kinerja 100%.
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun dengan output Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun, target 9 Dokumen, realisasi 9 Dokumen dan capaian kinerja 100%.

3. Program Penanganan Rawan Pangan

Indikator Program Penanganan Rawan Pangan adalah Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan, dengan Target penanganan daerah rawan pangan pada Tahun 2023 adalah sebanyak 4 Kecamatan (22,22%), realisasi 22,22% capaian kinerja 100%.

. Realisasi dan capaian indicator kinerja program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerja sebaga berikut :

- A. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi dengan output kegiatan adalah Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi, target 1 Dokumen dan capaian kinerja 100%. Sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan output Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan, target 1 Dokumen, realisasi 1 Dokumen dan capaian kinerja 100%.
- B. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi dengan output Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi, target 6 Dokumen dan capaian kinerja 100%. Adapun sub kegiatannya antara lain :
- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi dengan output Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi, target 5 Dokumen realisasi 5 Dokumen dan capaian kinerja 100%.
- b) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan output Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, target 1 Dokumen, realisasi 1 Dokumen dan Capaian kinerja 100%.
4. Program Perlindungan Konsumen Pangan

Target pada Renstra Dinas ketahanan Pangan Tahun 2023-2026, jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sebanyak 400 Sertifikat/Registrasi, dimana untuk Tahun 2023 targetnya sebanyak 100 Sertifikat/Registrasi (25%). Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan diperedaran yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan yang didaftarkan pada Tahun 2023 yaitu sebanyak 155 Sertifikat/Registrasi atau 155 % dari Target Tahun 2023 sebanyak 100 Sertifikat/Registrasi. Untuk Capaian Program sebesar **38,75%** dari target **25%**.

Realisasi capaian indikator program ini dicapai dari Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten Kota dengan output Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Capain kinerja 100%. Adapun sub kegiatannya sebagai berikut :

- a) Penguatan Kelembagaan Keamaanan Pangan Segar provinsi dengan output kelembagaan keamanan pangan segar provinsi yang dibina, target 1 Dokumen, realisasi 1 Dokumen dan capaian kinerja 100%.
- b) Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan output Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah, target 25 Sertifikat realisasi 27 Sertifikat dan capaian kinerja 108%.
- c) Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan output Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, target 30 Dokumen, realisasi 128 Dokumen (dan capaian kinerja 426,66%).

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN

TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

3.1.1 Target Kinerja

Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Tugas Pembantuan yang berasal dari Badan Pangan Nasional Republik Indonesia. Tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada instansi yang memberikan penugasan. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga kepada Kepala Daerah atas APBN yang digunakan untuk kegiatan Tugas Pembantuan. Tujuan pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan yang dibiayai dari APBN serta program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Provinsi dalam rangka mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah dalam mencapai visi misinya.

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan sesuai DIPA nomor : 125.01.3.690726/202 Tanggal 15 Agustus 2023

A. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

1. Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan rincian output :
 - a) Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, rincian kegiannya :

- Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan, target output 9 Rekomendasi Kebijakan, dengan capaian kinerja 100%.
 - Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, target output 1 Rekomendasi Kebijakan, dengan capaian kinerja 100%.
- b) Koordinasi, dengan rincian kegiatan :
- Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan, target output 9 Kegiatan, dengan capaian kinerja 100%.
 - Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, target output 7 Kegiatan, dengan capaian kinerja 100%.
 - Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan, target output 9 Kegiatan, dengan capaian kinerja 100%.
- c) Data dan Informasi Publik, dengan rincian kegiatan Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan, target output 1 data, dengan capaian kinerja 100%.
2. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanfaatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, dengan rincian output :
- a) Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, dengan rincian kegiatan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, target output 1 Data, dengan capaian kinerja 100%.
- b) Koordinasi, dengan rincian kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, target output 9 Rekomendasi Kebijakan, dengan capaian kinerja 100%.
- c) Data dan Informasi Publik, dengan rincian kegiatan :

- Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan, target output 1 Data, dengan capaian kinerja 100%.
 - Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi, target output 1 Data, dengan capaian kinerja 100%.
3. Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dengan rincian output :
- a) Koordinasi, dengan rincian kegiatan :
- Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, target output 4 Kegiatan, dengan capaian kinerja 100%.
 - Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, target output 1 Kegiatan, dengan capaian kinerja 100%.
- b) Promosi, dengan rincian kegiatan Promosi Pangan B2SA, target output 1 Promosi, dengan capaian kinerja 100%.
- c) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, dengan rincian kegiatan Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, target output 2 Kelompok Masyarakat, dengan capaian kinerja 100%.
- d) Perizinan Produk, dengan rincian kegiatan Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, target output 141 Produk, dengan capaian kinerja 100%.
- e) Pengawasan dan Pengendalian Produk, dengan rincian kegiatan Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan, target output 7 Produk, dengan capaian kinerja 100%.

B. Program Dukungan Manajemen

1. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan, dengan rincian output : Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, target output 1 Daerah, dengan capaian kinerja 100%.

3.1.2 Realisasi

Realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp. 2.947.952.376,- atau 88,49% dari total pagu anggaran Rp. 3.331.508.000,-. Berikut disajikan realisasi berdasarkan program dan rincian output.

Table 3.1
Realisasi Belanja berdasarkan Program dan Rincian Output

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/RINCIAN KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN		
	Alokasi Anggaran/PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	3.256.508.000	2.878.292.376	88,39
Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.206.462.000	1.021.732.000	84,69
Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	315.192.000	292.056.000	92,66
Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	129.192.000	111.056.000	85,96
Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	186.000.000	181.000.000	97,31
Koordinasi	829.220.000	667.626.000	80,51
Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	89.420.000	57.104.000	63,86
Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	672.750.000	548.086.000	81,47
Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	67.050.000	62.436.000	93,12
Data dan Informasi Publik	62.050.000	62.050.000	100,00

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	62.050.000	62.050.000	100,00
Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	624.805.000	554.735.000	88,79
Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	347.175.000	298.437.000	85,96
Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	347.175.000	298.437.000	85,96
Koordinasi	91.950.000	89.668.000	97,52
Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	91.950.000	89.668.000	97,52
Data dan Informasi Publik	185.680.000	166.630.000	89,74
Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	91.600.000	88.550.000	96,67
Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	94.080.000	78.080.000	82,99
Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1.425.241.000	1.301.825.376	91,34
Koordinasi	529.200.000	475.324.000	89,82
Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	460.200.000	410.188.000	89,13
Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	69.000.000	65.136.000	94,40
Promosi	31.000.000	31.000.000	100,00
Promosi Pangan B2SA	31.000.000	31.000.000	100,00
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	202.000.000	191.934.000	95,02
Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	202.000.000	191.934.000	95,02
Perizinan Produk	453.962.000	432.482.516	95,27
Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	453.962.000	432.482.516	95,27
Pengawasan dan Pengendalian Produk	209.079.000	171.084.860	81,83
Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	209.079.000	171.084.860	81,83
Program Dukungan Manajemen	75.000.000	69.660.000	92,88
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan	75.000.000	69.660.000	92,88
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	75.000.000	69.660.000	92,88
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	75.000.000	69.660.000	92,88
JUMLAH	3.331.508.000	2.947.952.376	88,94

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

3.2.1 Target Kinerja

3.2.2 Realisasi

-----**NIHIL**-----

3.3 Permasalahan dan Kendala

Dikarenakan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh provinsi baru diluncurkan pada bulan September 2023, sehingga kegiatan menumpuk di akhir tahun, sehingga banyak yang berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan yang bersumber pada APBD, hal tersebut menjadikan kegiatan itu tidak maksimla dalam pelaksanaannya.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL

- 4.1 **Urusan Pendidikan**
- 4.2 **Urusan Kesehatan**
- 4.3 **Urusan Pekerjaan Umum**
- 4.4 **Urusan Perumahan Rakyat**
- 4.5 **Urusan Ketentraman , Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat**
- 4.6 **Urusan Sosial**
- 4.7 **Program dan Kegiatan**

-----**NIHIL**-----

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2022 dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten disusun, dengan tetap berpegang pada Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yaitu “Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah”.. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2022 dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2022 mencakup antara lain : (1) Gambaran umum Dinas Ketahanan Pangan ; (2) Kebijakan ketahanan pangan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022; (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; (4) Penyelenggaraan tugas pembantuan/dana dekonsentrasi; dan (5) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2022, disusun sebagai bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, sebagai amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, serta sebagai bahan evaluasi kinerja tentang sejauh mana keberhasilan maupun kegagalan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022 dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan strategis yang mempengaruhinya.